



Makna Penerapan ESG Dalam Praktik Bisnis Industri Kecil: Studi
Fenomenologi Pada UKM Batik Wistara

Santi Prameswari ^{*1)}, Indrawati Yuhertiana ²⁾, Erna Sulistyowati³⁾

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : 23062020008@student.upnjatim.ac.id*

yuhertiana@upnjatim.ac.id, ernas.ak@upnjatim.ac.id

ABTRACT

This study aims to consider the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in the SME Batik Wistara in Surabaya, particularly the social aspect through the empowerment of employees with disabilities. Using a qualitative model with a phenomenological method, this study explores the experiences and meanings of SME actors related to ESG implementation. The results show that Batik Wistara has implemented several ESG aspects, including the use of renewable energy in production (Environment), the creation of an inclusive work environment for people with disabilities (Social), and business governance based on partnerships and ethical values (Governance). These findings reveal opportunities to strengthen ESG practices in SMEs, although there are still challenges in terms of limited resources and understanding.

Keywords: ESG; SMEs; Batik Wistara

ABSTRAK

Studi ini bertujuan mempertimbangkan penerapan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) pada UKM Batik Wistara di Surabaya, khususnya aspek sosial melalui pemberdayaan karyawan disabilitas. Memakai model kualitatif dengan metode fenomenologi, studi ini menggali pengalaman dan makna dari pelaku UKM terkait implementasi ESG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batik Wistara telah menerapkan beberapa aspek ESG, meliputi penggunaan energi terbarukan dalam produksi (Environment), penciptaan lingkungan kerja inklusif bagi penyandang disabilitas (Social), dan tata kelola usaha berbasis kemitraan serta nilai etis (Governance). Temuan ini mengungkap adanya peluang penguatan praktik ESG di UKM, walaupun masih ditemukan masalah di bagian keterbatasan sumber daya serta pemahaman.

Kata Kunci: ESG; UKM; Batik Wistara

Pendahuluan

Kemunculan tantangan pada perkembangan globalisasi saat ini, mengarah kepada isu pembangunan yang diprioritaskan pada integrasi berwawasan lingkungan (Febriana, et al., 2019). Tantangan berupa ketidaksetaraan dalam pembangunan lingkungan dan sumber daya manusia sering menjadi isu utama yang tak dapat diabaikan. Terdapat persoalan pada penyaluran finansial dan media penggunaan sumber daya menjadi faktor utama terjadinya ketidaksetaraan tersebut (Yolanda & Hasanah, 2024).

Isu ketidaksetaraan yang dipicu oleh ketimpangan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya (Yolanda & Hasanah, 2024), berpotensi diperparah oleh krisis lingkungan dan perubahan iklim. Dampak negatif dari degradasi lingkungan seringkali dialami secara tidak proporsional oleh kelompok masyarakat rentan, yang pada akhirnya memperburuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi (social-environmental inequality) (Schlosberg, 2004).

ESG yaitu model atau konsep yang menganalisis pengaruh lingkungan, sosial, dan tata kelola sebelum pengambilan keputusan. Konsep ini bukan hanya sekedar tren, melainkan juga menjadi suatu keharusan yang mendesak guna mewujudkan keberlanjutan ekonomi di tingkat global (Tarumingkeng, 2024: 5). Saat ini, ESG tidak hanya diterapkan dalam praktik operasional perusahaan skala besar saja, tetapi telah merambah pada sektor usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Namun pada pelaku UMKM, belum seluruhnya menerapkan prinsip ESG karena masih jauh dari jangkauan dan secara nyata dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar UMKM di berbagai wilayah (Noer, et al., 2024).

Hasil temuan di lapangan memperlihatkan adanya jurang yang lebar antara wacana ESG di tingkat nasional dengan kondisi nyata UMKM di Indonesia. Ketika perusahaan besar mulai berkonsentrasi pada isu dekarbonisasi, net zero emission, dan penyusunan laporan keberlanjutan, pelaku usaha mikro masih bergulat dengan masalah mendasar seperti keterbatasan modal, stagnasi inovasi produk, keterampilan pemasaran digital yang rendah, hingga kendala akses internet. Bahkan di sejumlah wilayah, jaringan telekomunikasi belum memadai sehingga transformasi digital sulit diwujudkan, artinya program pembinaan UMKM yang diluncurkan oleh pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan nyata UMKM. Pelatihan kewirausahaan juga sering kali tidak berlanjut karena keterbatasan anggaran, sementara penerapan standar ESG seperti penggunaan bahan ramah lingkungan atau sertifikasi keberlanjutan, masih dirasakan terlalu mahal dan memberatkan usaha kecil. Padahal banyak UMKM sebenarnya sudah

mengimplementasikan praktik berkelanjutan meski tidak menggunakan istilah ESG, seperti pengrajin lokal di Subang yang berhasil mengolah limbah tempurung kelapa menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi. Hal ini menunjukkan semangat ekonomi UMKM, meskipun tidak pernah tercatat dalam laporan keberlanjutan ESG (Link UMKM, 2025).

Selain pengrajin limbah tempurung di Subang tersebut, ternyata di Kota Surabaya juga terdapat UMKM yang berupaya menerapkan prinsip ESG dalam operasionalnya, yaitu UKM Batik Wistara yang mempekerjakan karyawan disabilitas sebagai bagian dari aspek social (S) dalam kerangka ESG karena berhubungan langsung dengan isu kesetaraan, inklusi, dan hak asasi manusia. Langkah ini mencerminkan komitmen UKM Batik Wistara dalam membuat lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial, praktik yang dilakukan oleh UKM Batik Wistara dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor, konsumen, dan masyarakat, karena menunjukkan kepedulian terhadap kaum difabel.

difabel banyak mengalami masalah di dunia kerja, yang disebabkan adanya kesulitan masyarakat untuk menerima perbedaan secara objektif, khususnya dalam hal penilaian terhadap keberagaman. Kondisi ini membuat pekerja dengan disabilitas kerap menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, mulai dari ketidakadilan upah, keterbatasan fasilitas akomodasi, hambatan dalam memperoleh promosi jabatan, hingga tidak adanya akses terhadap asuransi (Riana, et al., 2024).

Langkah UKM Batik Wistara dalam mempekerjakan penyandang disabilitas mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Pasal 14, semua perusahaan, tanpa memandang kepemilikan baik negara maupun swasta wajib memastikan kesempatan kerja yang sama bagi penyandang disabilitas. Perusahaan diharuskan mempekerjakan disabilitas sesuai dengan kualifikasi, tingkat disabilitas, pendidikan, dan kemampuan yang dimiliki.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kontribusi UMKM bagi penyandang disabilitas juga telah dilakukan oleh (Sitepu, et al 2024), dimana UMKM yang memberdayakan kaum disabilitas menghasilkan banyak perubahan positif karena kaum ini Mereka merasa lebih termotivasi untuk memperjuangkan hak-hak yang setara dan memperoleh kepercayaan diri yang lebih besar. Oleh sebab itu, berlandaskan beberapa penelitian terdahulu, maka akan dikembangkan penelitian baru pada UKM Batik Wistara untuk mengetahui penerapan ESG terutama pada aspek-aspek lainnya, selain aspek social yang

mempekerjakan penyandang disabilitas, dengan urgensi sebagai evaluasi untuk memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan dan memperbaiki tata kelola internal untuk meningkatkan adaptif mengacu pada pergerakan kebutuhan pasar dan standar keberlanjutan dalam ESG.

Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metodologi kualitatif fenomenologi interpretatif Heideggerian untuk mengkaji pengalaman hidup, pengalaman para informan terkait penerapan prinsip ESG serta peluang dan tantangan dalam mempekerjakan karyawan disabilitas di UKM Batik Wistara. Pendekatan ini menekankan pemahaman makna terdalam dari pengalaman informan, baik pemilik maupun karyawan, sehingga peneliti dapat menggambarkan struktur pengalaman secara autentik dari sudut pandang mereka.

Hasil Dan Pembahasan

Penerapan Environment, Social, Government (ESG) Pada UKM Batik Wistara

ESG merupakan metode yang menimbang pengaruh lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Konsep ini tidak lagi sekadar tren, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi global (Fanchi, 2024). Standar ESG digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan suatu bisnis secara menyeluruh, baik melalui regulasi formal maupun melalui tuntutan pemangku kepentingan dan investor terhadap isu lingkungan dan hak asasi manusia (Kostić & Hujdur, 2023). Dalam konteks penelitian ini, penerapan ESG pada UKM Batik Wistara dianalisis melalui sejumlah isu yang relevan. Adapun isu-isu yang diukur pada UKM Batik Wistara diantaranya sebagai berikut:

Konsumsi Energi (Environment)

Proses produksi Batik Wistara sangat bergantung pada energi terbarukan berupa sinar matahari. Pengelola UKM menjelaskan bahwa mereka sengaja tidak menggunakan mesin berbahan bakar gas atau listrik agar kualitas kain lebih terjaga dan biaya produksi tetap rendah. Ia menyatakan:

“Pengeringan semua pakai panas matahari. Tidak pakai oven karena nanti kain bisa turun kualitasnya.” (Pengelola UKM)

Penggunaan energi alami ini menunjukkan efisiensi energi dan minimnya jejak karbon, meskipun belum disertai pencatatan formal konsumsi energi.

Pengelolaan Limbah (Environment)

Pengelolaan limbah merupakan isu yang paling menantang. UKM belum memiliki fasilitas pengolahan limbah sendiri, namun terdapat kesadaran dan upaya awal untuk mengelola limbah secara lebih teratur. Pengelola UKM menyampaikan:

“Kalau untuk limbah cair masih ditampung biasa, memang kami masih butuh bantuan untuk membuat sumur resapan.”

Ketua RT turut menguatkan kondisi tersebut:

“Kami sudah komunikasi dengan DLH. Sudah ada rencana buat IPAL kecil untuk UMKM sekitar. Jadi nanti tidak langsung dibuang.”

Kelurahan Medokan Ayu juga menunjukkan dukungan:

“Kami rutin sosialisasi soal pengelolaan limbah. UMKM, termasuk Batik Wistara, diarahkan ikut program lingkungan yang lebih tertata.”

Dari berbagai informan, terlihat bahwa persoalan limbah belum terselesaikan tetapi arah perbaikan sangat kuat, apalagi dengan dukungan CSR PLN, ITS, dan BCA yang disebutkan oleh pengelola sebagai mitra pembinaan.

Penggunaan Sumber Daya Alam (Environment)

Air menjadi sumber daya utama dalam proses pewarnaan dan pencucian kain. Meskipun belum memiliki aturan pembatasan penggunaan air, wawancara mengindikasikan adanya kesadaran terhadap efisiensi:

“Air banyak dipakai, jadi kami usahakan tidak boros. Kalau bisa sekali pakai buat beberapa kain sekaligus.” (Pengelola UKM)

Kesadaran ini merupakan langkah awal menuju produksi yang lebih berkelanjutan, meskipun belum diformalkan dalam kebijakan internal.

Kondisi Kerja (Social)

Lingkungan kerja UKM Batik Wistara dinilai inklusif dan suportif, terutama bagi karyawan disabilitas. Pengelola UKM menekankan pendekatan humanis:

“Tidak boleh marah atau bentak. Mereka harus nyaman dulu supaya bisa bekerja tenang.”

Karyawan disabilitas juga merasakan kenyamanan tersebut:

“Di sini enak, kalau tidak bisa ya diajarin. Tidak ada yang marah-marah.” (Karyawan Disabilitas)

Sistem kerja berbasis borongan dianggap fleksibel dan adil, meskipun tingkat pendapatan masih bergantung pada produktivitas masing-masing. Relasi kerja yang harmonis terlihat dari solidaritas antarpekerja, di mana karyawan reguler membantu karyawan disabilitas saat mengalami kesulitan tertentu.

Keberagaman dan Inklusi (Social)

UKM merekrut pekerja tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisik, usia, maupun latar belakang. Rentang usia pekerja berada pada 20–35 tahun dan pembagian tugas didasarkan pada kemampuan, bukan kecacatan.

Pengelola UKM menceritakan:

“Kalau dia tidak bisa membatik, ya kami kasih bagian memotong atau mengepak. Semua ada tempatnya di sini.”

Praktik ini menunjukkan penerapan nyata dari diversity and inclusion pada level UMKM, sebuah aspek yang jarang ditemukan pada usaha skala kecil.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Social)

UKM memberikan perlindungan kerja sederhana seperti sarung tangan dan sepatu. Penanganan kesehatan ringan dilakukan menggunakan obat-obatan yang tersedia di tempat.

“Paling luka kena gunting atau jarum, tapi kami langsung tangani.” (Karyawan Non-Disabilitas)

Selain perlindungan fisik, UKM juga menyediakan dukungan mental melalui pelatihan penguatan diri yang difasilitasi oleh instruktur eksternal:

“Kami ikut pelatihan aura. Jadi lebih tenang, lebih fokus kerja.” (Karyawan Disabilitas)

Walaupun belum memiliki prosedur K3 yang tertulis, pendekatan personal dan dukungan psikologis menjadi ciri unik keselamatan kerja di UKM ini.

Manajemen Rantai Pasok (Governance)

Rantai pasok UKM bersifat sederhana namun stabil. Pemasok bahan baku berasal dari pemasok besar di Magelang dan toko lokal yang telah lama menjadi mitra.

Pengelola menjelaskan:

“Kain dari Magelang karena kualitasnya bagus. Tapi benang dan gunting kami ambil di Surabaya saja.”

Hubungan dengan pelanggan juga berjalan baik, terutama dengan institusi pemerintah yang rutin memesan produk. Tidak ditemukan kasus keterlambatan pembayaran maupun konflik etik. Hal ini menunjukkan adanya governance yang stabil, transparan, dan minim risiko.

Keterlibatan dengan Komunitas (Governance/Social)

Hingga saat ini UKM belum menjalankan program keterlibatan komunitas secara formal. Aktivitas sosial lebih banyak berupa kerja sama dengan lembaga pembina

seperti PLN, ITS, dan BCA, namun belum menysasar masyarakat secara langsung.

Ketua RT menyampaikan:

“Kalau kegiatan masyarakat belum ada, tapi UKM ini membantu menggerakkan ekonomi warga sekitar.”

Aspek community engagement ini menjadi area pengembangan yang penting untuk memperkuat penerapan ESG secara menyeluruh.

Kesimpulan Penerapan ESG

Secara keseluruhan, UKM Batik Wistara telah menerapkan beberapa aspek ESG secara nyata, terutama pada:

- Penggunaan energi terbarukan,
- Inklusi karyawan disabilitas,
- Hubungan kerja yang humanis, dan
- Rantai pasok yang stabil dan etis.

Namun, aspek lingkungan seperti pengelolaan limbah, konservasi air, dan dokumentasi formal belum optimal. Aspek tata kelola dan keterlibatan komunitas juga masih memerlukan penguatan. Meskipun demikian, dukungan pemerintah, lembaga CSR, dan komunitas lokal memberikan peluang besar bagi UKM untuk meningkatkan praktik ESG ke level yang lebih komprehensif.

Tantangan dan Peluang UKM Batik Wistara dalam Mempekerjakan Karyawan Disabilitas

Undang-Undang Penyandang Disabilitas Indonesia Tahun 1997 merupakan undang-undang penting yang bertujuan untuk melindungi dan mendukung penyandang disabilitas di negara ini. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencari dan mempertahankan pekerjaan seperti orang tanpa disabilitas. Undang-undang ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan kerja yang setara agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam angkatan kerja. Undang-undang ini juga menyoroti perlunya lingkungan kerja yang mudah diakses dan layak yang memenuhi kebutuhan khusus setiap individu berdasarkan kemampuan dan disabilitas mereka. Undang-undang ini mendorong para pemberi kerja untuk melakukan penyesuaian dan memberikan dukungan untuk membantu penyandang disabilitas berhasil dalam pekerjaan mereka. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas secara keseluruhan dengan memastikan mereka memiliki akses ke standar hidup

yang baik. Secara keseluruhan, undang-undang ini mempromosikan keadilan, inklusi, dan penghormatan terhadap hak-hak semua penyandang disabilitas di Indonesia.

Setelah dilakukan wawancara kepada pengelola UKM Batik Wistara tentang Tantangan dan Peluang UKM Batik Wistara dalam Mempekerjakan Karyawan Disabilitas, diperoleh hasil sebagai berikut:

"Tantangan yang cuman kalau anak anak marah marah aja mba yang lain enak mba kalau marah ada yang kayak kerasukan setan, tangan di seseti pisau harus sabar dengan anak anak.. Tuna rungu wicara dulu campur tuna daksa tapi setelah sering bertengkar ya sudah berarti ini harus cari solusi biar tidak bertengkar, anak anak yang tuna daksa satu persatu pamitan sudah tidak bekerja seperti menikah.. jumlahnya ada 8 yang gak bisa jahit jadi petik benang, setrika dan peaking.. ada anak anak yang bekerja di pavilio kalau ada kemampuan dicarikan kerja sekalian mba biar berkembang" (pengelola UKM)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola UMKM Batik Wistara, terlihat bahwa UMKM ini telah memberikan peluang kerja untuk difabel, yang searah dengan amanat (aturan Pemerintah Republik Indonesia 1997) hal Penyandang disabilitas, khususnya Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 14. Saat ini, UMKM Batik Wistara mempekerjakan delapan karyawan disabilitas yang tidak dapat melakukan pekerjaan menjahit, namun diberdayakan dalam proses produksi lainnya seperti memetik benang, menyetrika, dan melakukan pekerjaan packing. Hal ini menunjukkan komitmen UMKM dalam memberikan ruang kerja yang inklusif dan disesuaikan dengan kemampuan individu, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Namun, dalam praktiknya, pengelola UKM juga mengungkapkan sebanyak pembahasan tantangan yang dihadapi. Satu hal bagian penting yaitu kesulitan dalam mengelola emosi dan interaksi sosial antar karyawan disabilitas, khususnya ketika terjadi konflik. Ia menyebut adanya kasus karyawan yang marah hingga bersikap seperti "kerasukan", serta adanya gesekan antara karyawan tuna rungu-wicara dan tuna daksa, yang pada akhirnya membuat sebagian dari mereka mengundurkan diri karena merasa tidak nyaman. Meski demikian, pengelola UKM berusaha mencari solusi agar konflik tidak berlarut, serta memberikan perhatian khusus dan kesabaran dalam menghadapi berbagai situasi yang muncul.

Di sisi lain, terdapat pula peluang positif, yaitu keinginan pengelola UKM untuk membantu karyawan disabilitas berkembang. Beberapa dari mereka bahkan dibantu mencarikan pekerjaan di luar, seperti di pavilio (kemungkinan maksudnya pabrik atau tempat kerja lain), jika dianggap memiliki potensi atau kemampuan

tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam hal manajemen sumber daya manusia, UMKM Batik Wistara tetap membuka peluang pemberdayaan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Ke depan, pendekatan yang lebih sistematis, seperti pelatihan keterampilan sosial atau pendampingan psikologis, dapat menjadi strategi untuk mengoptimalkan integrasi penyandang disabilitas dalam lingkungan kerja yang inklusif dan produktif.

Kesimpulan

Studi ini mengumpulkan informasi dari berbagai acuan guna menganalisis masalah secara cermat dan mencapai muara yang jelas berdasarkan bukti yang dikumpulkan.

1. Lingkungan (Environment)

UKM Batik Wistara sudah menerapkan penggunaan energi berupa panas matahari untuk proses penjemuran batik, yang mendukung efisiensi energi dan kualitas produk. Namun, pengelolaan limbah produksi batik masih dalam tahap awal dan belum memiliki fasilitas terpadu, meskipun ada upaya kolaborasi dengan berbagai pihak seperti PLN, ITS, BCA, RT, Kelurahan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membangun sistem penanggulangan *wasting* yang baik untuk lingkungan setempat. Penggunaan sumber daya alam terutama air dan bahan pewarna masih memerlukan pengelolaan yang lebih baik guna mengurangi dampak lingkungan.

2. Sosial (Social)

UKM ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan sosial merekomendasikan tempat aktivitas yang ramah dan inklusif bagi pegawai disabilitas. Pendekatan yang empati dan pengelolaan yang sabar membuat suasana kerja kondusif, meski upah diberikan secara borongan dan kondisi kerja sederhana. Keberagaman karyawan dilaksanakan cukup baik terutama dalam hal gender, usia, dan kemampuan, dengan adanya perlakuan setara terhadap karyawan disabilitas dan tindakan pengelolaan konflik interpersonal. Kesehatan dan keselamatan kerja lebih ditekankan pada perhatian personal dan dukungan mental daripada prosedur formal.

3. Tata Kelola (Governance)

Pengelolaan rantai pasok UKM terjalin dengan baik berdasarkan hubungan kemitraan jangka panjang yang etis dan transparan. Struktur pengambilan keputusan tidak formal seperti dewan direksi besar, melainkan melibatkan pemilik dan kolaborasi erat dengan instansi pemerintah serta masyarakat sekitar,

khususnya dalam pemberdayaan sosial penyandang disabilitas. Manajemen risiko masih bersifat sederhana dan intuitif, dengan fokus utama pada menjaga hubungan pelanggan untuk kelangsungan usaha. Keterlibatan eksternal seperti dalam CSR dan komunitas masih minim, menjadi peluang pengembangan ke depan.

4. Tantangan dan Peluang dalam Mempekerjakan Karyawan Disabilitas

UKM Batik Wistara memberikan peluang kerja bagi delapan karyawan disabilitas dengan penyesuaian tugas sesuai kemampuan. Tantangan utama adalah pengelolaan konflik dan emosi antar karyawan disabilitas, yang memerlukan kesabaran dan solusi manajemen yang lebih sistematis. Namun, peluang terbuka dalam pengembangan dan pemberdayaan lebih luas melalui pelatihan dan penyaluran kerja di luar UKM.

Daftar Pustaka

- Anisa Rahmawati Putri Riana, Ikhfa Fauziyah, Siti Sofiah Adawiyah, Zidny Arriva Mulkia, and Siti Hamidah. 2024. "Peluang Dan Tantangan Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2(2): 389–99. doi:10.59581/deposisi. v2i2.3233..
- Ayu Winda Amalia, and Harry Z Soeratin. 2025. "Strategi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) Pada Kewirausahaan." *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 3(1): 34–42. doi:10.61896/jeki. v3i1.79.
- Bashir, Yasmeen, Yiwei Zhao, Huan Qiu, Zeeshan Ahmed, and Josephine Tan Hwang Yau. 2023. "Environmental, Social, and Governance Performance and Value Creation in Product Market: Evidence from Emerging Economies." *Journal of Risk and Financial Management* 16(12). doi:10.3390/jrfm16120517.
- Br Sitepu, Sri Nathasya, Krismi Budi Sienatra, and Monika Teguh. 2024. "Pemberdayaan Umkm Kaum Disabilitas Binaan Ypii Di Provinsi Bali." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7(2). doi:10.24198/kumawula. v7i2.54391.
- Fanchi, John R. 2024. "Environmental Socialism." *The Energy Transition and the Struggle for Global Governance*: 41–49. doi:10.1142/9789811290206_0003.
- Hapsari, Yulya Ammi, Putri Apriyanti, Aldi Hermiyanto, and Fahrur Rozi. 2024. "Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif* 2(4): 53–62.

- Kostić, Nevena, and Amina Hujdur. 2023. "Building a Sustainable Future: ESG Business Handbook." The AIRE Centre and UNDP Bosnia and Herzegovina: 1–74.
- Lubis, Nurul Wardani. 2022. "Resource Based View (RBV) in Improving Company Strategic Capacity." *Research Horizon* 2(6): 587–96. doi:10.54518/rh.2.6.2022.587-596.
- Maulana, Rusman. 2025. "Strategi Pengembangan Usaha UMKM Dengan Analisis SWOT." *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini* 2(3): 223–35.
- Pemerintah Indonesia. 2021. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." (086507): 1–121. [10] A. Rorres, *An Introduction to Linear Algebra*, 4 Edition. London: Pearson, 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 1997. "Undang-Undang No 4 Tahun 1997." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001* 2003(1): 1–5.
- Raja Kiswandi, Fawwazky, Muhamad Cesario Setiawan, and Muhammad Ghifari Alif. 2023. "Peran Umkm Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia." 1(4): 154–62.
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin." 17(33): 81–95.
- Sarjana, Sri, Aprilina Susandini, and Zul Azmi. 2021. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. *Manajemen UMKM*. <http://repository.usahid.ac.id/2296/1/22-11-77-EBOOK-Manajemen-UMKM.pdf>.
- Yolanda, Cindy. 2024. "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2(3): 170–86. doi:10.36490/jmdb.v2i3.1147.